

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan mengenai Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 02 Tahun 2013 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Perekonomian Nelayan (Studi kasus Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa) Sebagai berikut:

1. Berdasarkan Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten merupakan upaya strategis dalam mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam pesisir secara berkelanjutan dan mengurangi konflik pemanfaatan. Keberhasilan implementasi UU RZWP3K bergantung pada koordinasi yang optimal antara pemerintah pusat dan daerah, serta integrasi kebijakan lingkungan dan keadilan ekologis bagi komunitas pesisir. Kelembagaan yang kuat dan sinergi antar instansi diperlukan untuk mengatasi permasalahan lintas sektor, seperti konflik penggunaan lahan dan permasalahan pendataan. Pelibatan berbagai pihak secara kolaboratif membuka ruang untuk inovasi teknologi informasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Peran serta masyarakat menjadi elemen kunci dalam implementasi RZWP3K. Studi kasus di Kabupaten Serang, khususnya di Desa Lontar, menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan zonasi dapat menghambat

efektivitas pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan zonasi, tetapi juga menjamin bahwa pengelolaan lingkungan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

2. Berdasarkan Analisis mengenai timbulnya konflik pemanfaatan dan perlindungan ekosistem laut di Desa Lontar terkait Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2013, pasca implementasi Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2013 mengungkapkan bahwa regulasi ini telah mengubah paradigma pengelolaan kawasan pesisir dengan menekankan konservasi ekosistem laut di atas peningkatan kesejahteraan ekonomi nelayan. Kebijakan yang berfokus pada perlindungan sumber daya ikan dan lingkungan pesisir secara signifikan telah mengakibatkan dampak negatif terhadap struktur pendapatan nelayan. Data dan menunjukkan penurunan pendapatan mencapai hingga 60% dalam tahun pertama penerapan peraturan, akibat pembatasan metode penangkapan dan penutupan area tertentu yang sebelumnya mendukung kegiatan ekonomi tradisional mereka. Konflik juga dipicu oleh ketidakseimbangan distribusi manfaat antara upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam. Nelayan merasa terasing dari proses pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan yang mendalam serta menurunkan kepercayaan dan solidaritas dalam kehidupan sosial komunitas pesisir. Trauma kolektif yang telah berlangsung sejak 2004 akibat kerusakan lingkungan dari penambangan pasir semakin memperparah kondisi ekonomi dan sosial nara sumber di Desa Lontar dan keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada integrasi antara sistem monitoring teknis,

partisipasi aktif masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten. Pengumpulan data lingkungan secara sistematis serta pengembangan indikator perlindungan memungkinkan identifikasi area-area yang rawan mengalami degradasi dan memberikan dasar bagi penyesuaian kebijakan yang responsif terhadap dinamika lingkungan. Upaya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara multidimensi merupakan fondasi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut agar tidak terpapar tekanan eksploitasi yang berlebihan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Diharapkan Pemerintah daerah meningkatkan partisipasi nelayan dalam proses pembentukan dan implementasi kebijakan. Keterlibatan mereka sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi di lapangan.
2. Pelatihan dan Edukasi Berkelanjutan: Diharapkan Program pelatihan untuk nelayan mengenai praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan harus diperluas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan nelayan mengenai teknik-teknik yang berkelanjutan yang bisa meningkatkan hasil tangkapan sembari melindungi kelestarian ekosistem. Pembangunan infrastruktur dan teknologi informasi dan Peningkatan akses nelayan terhadap teknologi terbaru dan informasi yang akurat mengenai sumber daya perikanan sangat penting untuk keberlanjutan pengelolaan sektor ini. Dorong kerjasama antara lembaga pemerintah, lembaga penelitian,

dan penerapan teknologi untuk memperkuat pengelolaan sumber daya di tingkat lokal.

3. Regulasi yang Responsif dan Fleksibel: Diharapkan Peraturan daerah dirancang dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi lokal, serta harus ada ruang untuk penyesuaian apabila diperlukan. Maka dibutuhkan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan komunitas nelayan untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya melindungi ekosistem tetapi juga mendukung keberlangsungan ekonomi Masyarakat dan Usaha Pengelolaan Lingkungan yang Terintegrasi. Kegiatan rehabilitasi berbagai kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan harus menjadi prioritas. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah diperlukan untuk menciptakan pemecahan masalah yang terintegrasi dan komprehensif.